

Tazkiya

Jurnal Pendidikan Islam

**PERENCANAAN PEMBELAJARAN
DOSEN JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUMATERA UTARA**

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)**

**PENGETAHUAN GURU FIKIH TENTANG ILMU HADITS YANG TERKAIT
DENGAN HADITS JUAL BELI PADA MADRASAH TSANAWIYAH
AMIN DARUSSALAM BANDAR SETIA KEC. PERCUT SEI TUAN**

POTRET BURAM PENDIDIKAN NASIONAL

**PENERAPAN PEMBELAJARAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA MATERI
PENGERTIAN DAN PENYEBAB TAKABBUR DALAM
MATA PELAJARAN PAI T.P 2015/2016**

**PENGARUH METODE PEMBELAJARAN DISKUSI DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN SISWA PADA PEMBELAJARAN
AL-QUR'AN-HADIS KELAS X MA LABORATORIUM
UMN AL-WASHLIYAH MEDAN**

**URGENSI ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

**KONTRIBUSI MAJELIS TA'LIM DALAM
MENANAMKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER
TERHADAP REMAJA MESJID DESA CINTA RAKYAT KEC. PERCUT SEI TUAN**

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA (UINSU) MEDAN

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id>

POTRET BURAM PENDIDIKAN NASIONAL**Asnil Aidah Ritonga**

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara

Email: asnilaidah@uinsu.ac.id**Muhammad Basri**

Guru MAN 1 Medan, Sumatera Utara

Email: basri.medan@gmail.com

Abstrak: Pendidikan nasional hingga saat ini tetap menjadi perhatian khusus pemerintah. ini dikarenakan indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau *education for all* (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Potret pendidikan Indonesia, selain sebagai kontribusi positif yang telah dimainkan, juga sarat dengan persoalan yang kian hari kian kompleks dan sulit diurai. Ada jurang yang lebar antara tujuan ideal dengan realitas di lapangan. Potret buram pendidikan nasional tersebut di antaranya; sistem pendidikan nasional bersifat parsial, tidak utuh dan tidak sistematis. Implikasi dari sistem yang semacam ini adalah dihasilkannya out put yang memiliki karakteristik yang terpecah. Selanjutnya kurikulum yang kurang mencerdaskan, kelemahan lain dari sistem pendidikan nasional dapat kita cermati dari kontruksi kurikulum yang ditawarkan. Karakteristik kurikulum yang dikembangkan nampaknya kurang progresif. Rumusannya masih berkisar menjawab berbagai persoalan dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun kedepan. Di samping kurikulum yang kurang mencerdaskan, nalar egoisme yaitu egoisme kedua orang tua yang memaksa anak untuk masuk disuatu sekolah atau belajar suatu pelajaran yang tidak diminati dan tidak disukai si anak sehingga belajar menjadi terpaksa. Ini menimbulkan dampak negatif dalam pencapaian pembelajaran. Potret buram pendidikan berikutnya adalah masyarakat yang mabuk gelar. Gelar dapat diperjual belikan, tanpa harus kuliah di Perguruan Tinggi seseorang dapat gelar asalkan membayar dengan sejumlah uang, ini adalah suatu pembohongan terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Makalah ini akan membahas persoalan-persoalan di atas, selanjutnya di diskusikan untuk mencari solusi demi kemajuan pendidikan nasional Indonesia

Kata Kunci: Potret, Pendidikan, Nasional, Pemerintah

Abstract: *National education today remains a special concern of the government. This is because the educational development index for all or education for all (EFA) in Indonesia decreased each year. Images of education in Indonesia, as well as the positive contribution that has been played, it is also loaded with problems that were increasingly complex and difficult to disentangle. There is a big gap between ideals with the reality on the ground. Blurred portrait of the national education among them; the national education system is partial, incomplete and unsystematic. The implications of this kind of system is it generates output that has characteristics that are split. Furthermore, the curriculum is less intellectual, the other weaknesses of the national education system can we look at the construction of the curriculum offered. Characteristics of the curriculum developed seemed less progressive. His formulation is still around to answer various problems within a period of 5 or 10 years. In addition to the curriculum that is less intellectual, reasoning that egoism egotism of two parents who force children to enter the sector in school or learning a lesson that is not desirable and undesirable child to learn to be forced. This had a negative impact on learning achievements. Blurred*

portrait next level is a society that drunk degree. Holds can be traded, without having studied at College of the title as long as one can pay a sum of money, this is a deception of self, society, nation and state. This paper will discuss issues above, further discussed to find solutions for the advancement of the Indonesian national education

Keywords: *Portrait, Education, National, Government.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional hingga saat ini tetap menjadi perhatian khusus pemerintah. ini dikarenakan indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau *education for all* (EFA) di Indonesia menurun tiap tahunnya. Potret pendidikan Indonesia, selain sebagai kontribusi positif yang telah dimainkan, juga sarat dengan persoalan yang kian hari kian kompleks dan sulit diurai. Ada jurang yang lebar antara tujuan ideal dengan realitas di lapangan. Potret buram pendidikan nasional tersebut di antaranya; sistem pendidikan nasional bersifat parsial, tidak utuh dan tidak sistematis. Implikasi dari sistem yang semacam ini adalah dihasilkannya out put yang memiliki karakteristik yang terpecah.³¹

Selanjutnya kurikulum yang kurang mencerdaskan, kelemahan lain dari sistem pendidikan nasional dapat kita cermati dari kontruksi kurikulum yang ditawarkan. Karakteristik kurikulum yang dikembangkan nampaknya kurang progresif. Rumusannya masih berkisar menjawab berbagai persoalan dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun kedepan.

Di samping kurikulum yang kurang mencerdaskan, nalar egoisme yaitu egoisme kedua orang tua yang memaksa anak untuk masuk disuatu sekolah atau belajar suatu pelajaran yang tidak diminati dan tidak disukai si anak sehingga belajar menjadi terpaksa. Ini menimbulkan dampak negatif dalam pencapaian pembelajaran.

Potret buram pendidikan berikutnya adalah masyarakat yang mabuk gelar. Gelar dapat diperjual belikan, tanpa harus kuliah di Perguruan Tinggi seseorang dapat gelar asalkan membayar dengan sejumlah uang, ini adalah suatu pembohongan terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Makalah ini akan membahas persoalan-persoalan di atas, selanjutnya di diskusikan untuk mencari solusi demi kemajuan pendidikan nasional Indonesia.

³¹ Ngainun Naim, *Rekonstruksi Pendidikan Nasional Membangun Paradigma yang Mencerahkan*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 25-26.

B. KURIKULUM YANG KURANG MENCERDASKAN

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.³² Secara umum isi kurikulum merupakan bahan kajian dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, dimana kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.³³

Maka kurikulum menjadi amat penting dan besar pengaruhnya dalam menciptakan generasi bangsa, tapi sayangnya kurikulum selalu dijadikan sebagai alat dalam menjalankan kepentingan-kepentingan tertentu. Padahal produk dari kurikulum akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Ini terbukti dari kurikulum yang selalu berubah-ubah dan membingungkan pengguna kurikulum.

Kalau dibandingkan di negara-negara maju, ternyata kurikulum bersifat progresif karena bersifat antisipatif terhadap tantangan kehidupan dalam jangka panjang.³⁴ Secara umum, ada dua pandangan teoritis mengenai tujuan pendidikan, masing masing dengan tingkat keragamannya sendiri. Pandangan teoritis yang pertama berorientasi kemasyarakatan, yaitu pandangan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan rakyat yang baik, baik untuk sistem pemerintahan demokratis, oligarkis, maupun monarkis. Pandangan teoritis yang kedua lebih berorientasi kepada individu, yang lebih memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung, dan minat belajar.³⁵

Sistem pendidikan yang diterapkan di negara-negara yang ada di dunia ini berorientasi kemasyarakatan, kenegaraan. Pandangan ini dianut oleh aliran Perennial atau aliran transmisi kebudayaan yang sering dihubungkan dengan Plato, sarjana Barat Abad Pertengahan, dan beberapa sarjana modern, seperti William T. Harris, Robert Hutchins, dan Adler di Amerika, juga aliran Rekonstruksi Sosial Modern yang diwakili oleh George S. Count, Paulo freire di

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1 butir 9.

³³ Ibid, pasal 37.

³⁴ Ngainun Naim, *Rekonstruksi.*, Ibid, h. 34.

³⁵ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, terjemahan dari Bhs Inggris *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, (Jakarta: Mizan cetakan I, 2003), h. 163.

Brasil, dan Jurgen Habermas di Jerman. Sebaliknya, hampir semua agama besar menganut pandangan yang berorientasi kepada Individu.³⁶

Sementara di Indonesia pendidikan nasional dapat dikatakan terkesan tidak fokus dalam memikirkan kurikulum, karena ganti menteri pendidikan maka ganti pula kurikulum dan sistem pendidikannya. Dalam catatan sejarah sebelum Indonesia merdeka, kurikulum yang diterapkan belanda adalah kurikulum yang difokuskan untuk kepentingan belanda dengan dua bahasa pengantar yaitu bahasa melayu dan bahasa belanda, ini dilakukan agar pegawai-pegawai rendahan belanda dapat menulis dan membaca demi kepentingan usaha mereka. Setelah Indonesia merdeka mulailah dipikirkan pemerintah tentang kurikulum yang sesuai dengan rakyat Indonesia.

Muncullah kurikulum 1947 untuk pertama kalinya, kemudian berubah lagi pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan itu sampai terjadi sebanyak 12 kali . Apakah perubahan-perubahan tersebut kearah yang lebih baik atau justru membingungkan pelaku pendidikan baik pendidik maupun peserta didik. Sering terjadi belum tampak jelas keberhasilan satu bentuk kurikulum, sudah dirubah dengan kurikulum berikutnya, sehingga sulit diukur tingkat keberhasilannya. Perubahan kurikulum biasanya dimulai dari perubahan konsepsional yang fundamental yang diikuti oleh perubahan struktural. Untuk melihat perubahan-perubahan tersebut, berikut akan diuraikan satu-persatu secara kronologis sebagaimana berikut ini:

1. Kurikulum tahun 1947.

Setelah kemerdekaan RI tahun 1945, maka pembelajaranpun mulai dipikirkan. Pada tahun 1947 muncullah kurikulum pertama di Indonesia yang dikenal dengan rencana pelajaran 1947 yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *leer plan*, artinya rencana pelajaran, yang memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan garis-garis besar pengajaran.

Diketahui bahwa kurikulum ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sepiantas terlihat hanya meneruskan kurikulum yang digunakan Belanda sebelumnya. Maka tidak mengherankan kalau titik tekan kurikulum ini adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, daripada pendidikan pikiran.

Meskipun sudah merdeka, namun kurikulum 1947 masih bersifat politis, karena masih menerapkan kurikulum Belanda, yang orientasi pendidikan dan pengajarannya ditujukan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Karena situasi perpolitikan masih tetap bergulir, maka memiliki dampak terhadap operasional kurikulum 1947, sehingga baru diterapkan pada tahun 1950.

³⁶*Ibid*, h. 164.

Susunan Rencana Pelajarannyapun sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari.

2. Kurikulum Tahun 1950

Kurikulum tahun 1950 lahir dengan munculnya UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Rencana Pelajaran 1950 sebenarnya merupakan reparasi dari Rencana Pelajaran 1947. Terjadi perubahan nama dari Rencana Pelajaran menjadi Rencana Pendidikan. Jika dicermati lebih lanjut kurikulum 1950 ini hanya menjalankan kurikulum tahun 1947.

3. Kurikulum 1952

Setelah dirasakan kurikulum di atas kurang maksimal, maka mulailah dilakukan perubahan pada tahun 1952 yang disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, dimana isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

4. Kurikulum 1964

Tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia, yang bertepatan di penghujung era Presiden Soekarno, yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964 yang fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pancawardhana). Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, dimana pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik.

5. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kurikulum 1968 ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

6. Kurikulum 1974

Kurikulum 1968, sebagai kurikulum pertama yang menggunakan pendekatan integrasi (*innegrated curriculum*) untuk menggantikan pendekatan kurikulum sebelumnya yang selama

ini menggunakan pendekatan terpisah-pisah (*separated curriculum*). Kurikulum yang seperti ini dirasakan kurang maksimal sehingga diadakan perbaikan-perbaikan yang melahirkan kurikulum 1974. Kurikulum tahun 1974 disebut dengan Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan yang hanya berlaku selama 1 tahun. Arah pendidikannya adalah menjadikan anak didik sebagai ‘pegawai’. Konsepsi ini dibangun oleh pemikiran negara Hindia Belanda yang menjadikan kekuatan pegawai sebagai pembentuk tertinggi kekuatan negara. Inilah menciptakan generasi penakut, yang hanya ingin menjadi pegawai negeri dan generasi yang gagal untuk kreatif dan membentuk dunia yang lebih berkebudayaan sehingga kurikulum ini perlu di rubah.

7. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) yang termaktub dalam satuan pelajaran pada setiap satuan bahasan yang diuraikan dalam Tujuan Instruksional Khusus (TIK). Kurikulum ini banyak dikritik karena membuat guru kerepotan dalam merinci keinginan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

8. Kurikulum 1984 (Kurikulum CBSA)

Perubahan kurikulum 1984 mengutamakan pendekatan proses (*process skill approach*), dengan tidak mengenyampingkan faktor tujuan. Maka namanya juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

Tujuan instruksional menjadi orientasi kurikulum ini. Sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. CBSA (cara belajar siswa aktif) menjadi karakter kurikulum tersebut.

9. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 mengubah sistem pembagian waktu pelajaran dari sistem semester ke sistem catur wulan yang dibagi menjadi tiga tahap dalam satu tahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Namun masalah tetap bergulir dimana kondisi lulusan yang kurang siap dalam dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan. Atas dasar inilah pemerintah berusaha mengembangkan kurikulum baru yang mampu membekali siswa berkaitan dengan problem-solving kehidupan.

10. Kurikulum 2004

Kurikulum 2004 disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kompetensi yang dimaksudkan adalah perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kurikulum berbasis kompetensi suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar *performance* tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.³⁷ Maka karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi adalah menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, menggunakan pendekatan dan multi metode dalam pembelajaran, sumber belajar bukan hanya guru tapi sumber-sumber lainnya, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya pencapaian suatu kompetensi.³⁸

11. Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Permalahan pendidikan yang tiada hentinya mengharuskan dirubahnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).³⁹KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.⁴⁰ KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan. Secara khusus salah satu tujuan diterapkannya KTSP adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.⁴¹

12. Kurikulum 2013

Kurikulum terbaru 2013 ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun ciri kurikulum 2013 yang paling mendasar ialah menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Sedangkan untuk siswa lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki

³⁷E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), h. 35-39.

³⁸Depdiknas, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang, 2002)

³⁹Mansur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual Panduan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 12.

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 15.

⁴¹E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), h. 21-22.

kemampuan berpikir kritis yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Tujuannya adalah terbentuk generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.

Bila dicermati perubahan-perubahan kurikulum di atas, terkesan perubahan tersebut kurang menyentuh hal yang substantif. Sebagai contoh dapat dilihat pada perubahan kurikulum 1994 yang menimbulkan kritikan yang banyak dari masyarakat yang menginginkan kompetensi di dunia global, sehingga muncul Undang-undang Sisdiknas dan PP no 19 tahun 2005 yang merubah sistem sentralistik menjadi desentralistik. Tindak lanjut dari situasi ini maka muncullah Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KTSP. Tapi apa yang terjadi, KTSP pun harus dirubah lagi menjadi kurikulum 2013. Makanya menurut Assegaf, sejak orde baru yang menghasilkan kurikulum 1975 hingga setelah reformasi (sekitar 27 tahun) kurikulum pendidikan nasional tidak mengalami perubahan yang berarti.⁴²

Akhirnya kurikulum yang ada di Indonesia terkesan perubahan dan pengelolaannya tidak serius, tujuan yang ingin dicapai selalu tidak seiring dan sejalan, sistem pendidikan Islam bersifat parsial, tidak utuh dan tidak sistematis. Ini mengakibatkan para alumninya hanya mampu melahirkan ilmu dan teknologi, akan tetapi tidak mampu menarapkan nilai-nilai dari kurikulum tersebut. Maka hasil dari penerapan isi kurikulum selalu tidak memuaskan. Anak-anak yang masih tergolong pelajar dan mahasiswa kerap melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak, seperti tawuran, narkoba, geng motor, perkelahian antar sekolah dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kurikulum yang ada di Indonesia hanya mengejar kognitif saja dan kurang menerapkan nilai-nilai afektif dan psikomotoriknya.

Tidak dapat dipungkiri kenakalan-kenakalan pelajar dan mahasiswa di atas juga terjadi di Negara-negara maju baik pada sekolah tradisional, swasta, ataupun modern. Data yang diperoleh dari sekolah-sekolah yang di survey menunjukkan adanya kejahatan termasuk pelecehan, adu fisik, perampokan, pencurian, pengrusakan dengan kasar dan kejam, aktifitas geng, pemilikan senjata tajam dan penghinaan fisik terhadap guru. Di samping itu problematika tingkah laku termasuk tidak hormat dan penghinaan lisan terhadap guru, kelas yang kacau tidak disiplin, penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol dan masalah ras antar peserta didik.⁴³

Di samping itu jika diperhatikan kurikulum yang ada di Indonesia selalu hasilnya tidak memenuhi kebutuhan pasar, yang pada akhirnya para tamatannya tidak mampu berkisah di masyarakat. Seolah-olah apa yang dipelajarinya di bangku pendidikan formal, kurang ada

⁴² Aburrahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra Proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), h. 163.

⁴³ James H. Stronge, et.al., *Qualities of Effective Principals* (Alexandria, Virginia, USA: ASCO, 2008), h. 91.

hasilnya ketika ia terjun dalam dunia pekerjaan, sehingga para orang tua selalu kecewa terhadap pengetahuan anaknya. Kemudian yang sering juga terjadi adalah ketidak sesuaian antara latar belakang pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Sebagai contoh seseorang yang berlatang belakang pendidikannya dari Fakultas Ushuluddin tetapi kurang tersedia lapangan pekerjaannya, akhirnya bekerja menjadi guru meskipun bukan jadi pilihannya. Banyak sekali jurusan-jurusan yang ada di Indonesia yang belum jelas pasarnya. Semacam tidak ada koreksi pemerintah mengenai hal ini. Seharusnya penetapan jurusan-jurusan tersebut baik dari segi kualitas dan kuantitasnya disikapi pemerintah dengan menyesuaikannya dengan kebutuhan pasar.

Ringkasnya jika ingin melakukan perubahan kurikulum harus terlebih dahulu diadakan penelitian yang serius, jangan hanya dilakukan menurut perkiraan-perkiraan semata. Bahkan menurut S. Nasution perubahan kurikulum membutuhkan penelitian historis, karena setiap perubahan dilakukan akan membawa dampak yang cukup signifikan pada setiap stakeholders pendidikan.⁴⁴

C. BURUKNYA INFRASTRUKTUR SEKOLAH

Negara yang maju pastilah karena pendidikan yang maju dan di dukung dengan infrastruktur yang memadai dan peran pemerintah yang sangat peduli juga berperan penting sebagai pendukung para pengajar agar melahirkan bibit-bibit unggul yang akan membawa negara semakin maju dan sejahtera. Pergantian atau pembaharuan kurikulum pun dilakukan pemerintah dengan pemikiran panjang agar semakin baik dan majunya pendidikan di Indonesia ini.⁴⁵

Namun bagaimana dengan nasib para anak bangsa yang berada di daerah terpencil dan sangat sulit untuk mencapainya dari pusat kota? jangankan jaraknya, infrastruktur sekolah merekapun sangat memprihatinkan. Banyak daerah-daerah yang sangat memprihatinkan, jangankan sekolah yang memiliki komputer, ruang kelas yang nyaman, gedung sekolah yang kokoh seperti di kota-kota atau daerah-daerah yang mudah di akses dari pusat kota.

Buruknya infrastruktur pendidikan (sekolah), diberbagai media tiada henti kita menyaksikan betapa buruknya infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah terutama di daerah-daerah terisolasi yang jauh dari perkotaan, ini tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional. Di daerah pelosok, banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki infrastruktur yang baik dan layak, gedung-gedung sekolah yang membahayakan para muridnya, gedung yang sudah lapuk dan sewaktu-waktu dapat roboh ini masih di gunakan oleh para siswa dan guru untuk belajar dan mengajar terbatasnya buku-buku yang di gunakan dan tidak sesuai dengan kurikulum

⁴⁴S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Bandung: Penerbit Jemmars, 1988), h. 219.

⁴⁵ M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 1.

yang berlaku. Padahal dana untuk pembangunan infra struktur untuk tahun 2013 cukup besar yaitu Rp.10.090.774.000.000 (Sepuluh triliun sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK⁴⁶, namun pembangunannya tidak merata.

Beberapa faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan di sekolah yang perlu dicari jalan keluarnya di antaranya :

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

Menurut data Balitbang Depdiknas menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami kerusakan berat. Sementara kondisi Madrasah Ibtidaiyah diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga terjadi di SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan persentase yang tidak sama.⁴⁷

Padahal jika berkaca ke negara-negara yang maju, mereka telah lama sekali menerapkan sarana fisik yang memadai. Sebagai contoh dalam penggunaan teknologi di sekolah dimana pada tahun 1990 an mereka telah mengoperasikan teknologi sebagai berikut:

- Rasio siswa pengguna komputer hampir 20 sampai 1.
- Komputer lebih sering ditempatkan di laboratorium pusat dari pada di kelas.
- Kemampuan siswa dalam bidang teknologi secara mendasar ditujukan pada pembelajaran dasar-dasar penggunaan komputer kemudian mengintegrasikan teknologi dengan kurikulum.

Dalam dekade berikutnya terjadi peningkatan perubahan yang mendalam sebagai berikut ini:

⁴⁶Peraturan Menteri Keuangan RI no 201/PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun 2013, bab II Pasal 2

⁴⁷<http://meilankasim.wordpress.com/2009/03/08/makalah-masalah-pendidikan-di-indonesia/> (diakses 21 September 2014)

- Hampir semua sekolah di Amerika Serikat memiliki akses internet dan kemampuan komputer yang lebih cepat.
- Rasio siswa terhadap komputer berkuran 5 sampai 1.
- Kebanyakan komputer diletakkan di kelas.
- Guru mendemonstrasikan dengan penuh percaya diri di dalam kelas penggunaan komputer sebagai hasil dari latihan.⁴⁸

Sementara di Indonesia pelaksanaan pembelajaran masih banyak yang melakukan cara tradisional, dimana pendidik masih mengandalkan diri sebagai sumber utama sehingga banyak menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab saja. Hal ini disebabkan karena sarana fisik yang memadai belum tersedia, meskipun tuntutan kurikulum mengharuskan pendidik untuk menggunakan IT. Maka jelas masalah sarana fisik ini belum memadai dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

2. Rendahnya kualitas guru

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

Di samping itu penyebab rendahnya kualitas guru menurut hemat penulis disebabkan beberapa faktor di antaranya:

- a. Input dan bibit guru-guru yang ada di Indonesia bukan berasal dari intelegensi yang tinggi. Alumni-alumni sekolah paporit dan ternama selalu mengambil jurusan-jurusan ternama di perguruan-perguruan tinggi yang baik seperti UI, ITB, UGM, UNDIP dan seterusnya. Amat jarang anak-anak yang berprestasi unggul mengambil jurusan keguruan yang tuasnya sebagai guru kelak. Maka sering ditemukan yang memilih

⁴⁸James H, Stronge, at.al....., h. 102.

jurusan pendidikan adalah alumni-alumni yang memiliki intelegensi yang “biasa-biasa saja”, maka tidak mengherankan kalau guru sulit untuk melakukan inovasi.

- b. Kurangnya pelatihan, workshop- workshop yang berkaitan dengan peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran.
- c. Minat dan motifasi yang kurang disebabkan prustrasi terhadap kenyataan-kenyatann yang dihadapi sehari-hari di sekolah.
- d. Kurangnya *reward* bagi guru-guru yang berprestasi dan *punishment* pada guru-guru yang “malas”.

Akibat rendahnya kualitas guru-guru yang ada, maka kharisma guru-gurupun semakin menurun, bahkan terkadang dilecehkan anak-anak. Hal ini disebabkan karena mereka sudah kurang mengidolakan gurunya. Di mata mereka guru kurang memiliki prestasi yang membanggakan, susah untuk di gugu dan ditiru. Ini menunjukkan bahwa jati guru yang professional sulit untuk ditemukan.

3. Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 10 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 5-6 juta. guru bantu Rp, 2 juta, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 20 ribu per jam bahkan di bawah Rp. 20.000. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Padahal di Negara-negara tetangga seperti Malaysia sudah mulai menghargai kesejahteraan guru. Sulit untuk di bandingkan antara penghasilan guru di Indonesia dengan guru di Malaysia.

4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan

dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.⁴⁹

5. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

6. Mahalnya biaya pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.

Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, — sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Belum lagi jika menginginkan sekolah elit, dimana di samping biaya pendaftaran dan biaya bulanan yang mahal, orang tua juga harus membayar sejumlah uang yang bervariasi yang disebut dengan biaya sumbangan atau uang pembangunan.⁵⁰

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi,

⁴⁹ Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama. (Jakarta: Balitbang Depdiknas, tahun 2000), h. 10.

⁵⁰Invantra Padang, *Penomena Sekolah Elit Muslim*, Dalam Asnil Aidah Ritonga(ed), *Pendidikan Islam Dalam Buaian Arus Sejarah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008), h. 257.

kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk ‘cuci tangan’.

Rendahnya mutu pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara ringkas menurut Baharuddin⁵¹ ada lima faktor penyebabnya:

1. Rendahnya komitmen pemerintah kepada dunia pendidikan. Secara konstitusional komitmen nasional kepada dunia pendidikan sangat tinggi, namun secara operasional masih rendah.
2. Kekeliruan filosofis. Ada tiga persoalan yang mendasar yang dipersepsikan masyarakat yaitu tentang apa pendidikan, apa mutu pendidikan, dan apa produk pendidikan.
3. Lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik. Kualitas peningkatan pengetahuan dan ketrampilan guru masih rendah.
4. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sampai saat ini bersifat sentralistik, strukturalistik, dan birokratif.
5. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang masih paternalistik memicu anak kurang kreatif sehingga guru sangat menentukan pembelajaran.

D. NALAR EGOISME

Belajar yang menyenangkan bagi seorang anak adalah bila pelajaran itu disenangi dan menjadi bakat dan lebih-lebih menjadi cita-cita anak. Bila anak senang dalam belajar maka pelajaran itu akan lebih mudah dipimaminya. Sebaliknya jika seorang anak tidak senang seperti tertekan, terpaksa, rasa takut yang berlebihan maka pelajaran akan sulit dipahami. Maka perlu ada hubungan yang efektif antara anak dengan orang tua, atau antara anak dengan orang dewasa/guru yang mampu memainkan peran penting dalam melahirkan kepekaan moral tertentu pada seseorang melalui nuraninya.⁵²

Jangan seperti yang terlihat dalam belajar yang hanya berorientasi pada pembentukan daya kognitif otak saja dan memalingkan dari pengembangan spiritual, dan pengembangan emosional anak, adalah aborsi dalam pendidikan; memaksa anak untuk lahir sebelum waktunya. “*Early Ripe, early rot*” cepat masak, cepat busuk, mengingatkan kita agar tidak tergesa-gesa dalam membentuk anak untuk segera jadi, dan siap berkompetensi dalam hidup.

⁵¹Baharuddin, *Aktualisasi Psikologi Islami*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h. 233-235

⁵²Jean Piaget, *The Psychologi of the Child (Psikologi Anak)*, Terj.Miftahul Jannah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 137.

Ada tren dalam masyarakat untuk sesegera mungkin melihat anaknya berprestasi. Sejak usia dini sudah dikenalkan dengan program-program pendidikan, dimana program-program itu telah menjajah jiwa anak yang bebas menjadi terikat, hingga waktu yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan jiwanya dengan bermain, terkorupsi oleh keinginan orang tua untuk melihat anaknya menjadi anaknya yang unggul. Misalnya, tuntutan wali murid agar anaknya segera mampu membaca, telah menggiring guru-guru TK memaksa anak-anak untuk mampu membaca. “Pendidikan kita cenderung memperkosa dibanding membebaskan”.

Memang “*Knowledge is power, but character is more*” (pengetahuan adalah kekuatan, namun karakter adalah diatas atau lebih unggul dari ilmu pengetahuan). Inilah statement yang membuat banyak orang pesimis akan pendidikan di Indonesia ini. sebab yang yang terjadi pada pendidikan di Indonesia adalah kebalikan dari statement di atas. Pendidikan kita cenderung untuk mengeksploitasi anak agar mampu bersaing dengan yang lainnya demi memperoleh pekerjaan yang ujung-ujungnya adalah “kesejahteraan di bidang ekonomi”,⁵³ mendapatkan pekerjaan yang layak, menjadi orang yang kaya. Karena ukuran untuk mendapatkan pekerjaan adalah kepemilikan Izajah, sementara Izajah isinya adalah deretan angka yang diperoleh anak ketika menjawab soal ujian, maka jelaslah yang menjadi soal terbesar dalam pendidikan kita adalah otak.

Orang tua akan malu apabila nilai matematika anaknya tiga, atau dua. Segala cara dilakukan dengan mengkursuskan anak pada tempat-tempat kursus favorit, agar terhindar dari rasa malu akibat nilai jelek yang diperoleh anaknya. Ukuran suksesnya pendidikan hanya terpaku pada besar kecilnya nilai anak dalam sebuah ujian.

Manusia disebut manusia bukan karena ia memiliki otak saja, melainkan ada dimensi yang lainnya dimana dengannya manusia bisa dibedakan dengan mahluk yang lain. Di samping otak, ada hati dan jiwa. Pendidikan yang hanya terfokus pada pengelolaan kemampuan otak saja akan gagal membangun seseorang menjadi manusia. Akibatnya banyak anak pintar ,tetapi akhlak dan karakternya tidak tumbuh, dan cenderung rusak. Ketiga dimensi di atas harus dikelola secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan ketika anak harus bersosialisasi.

E. AKIBAT MASUK SEKOLAH YANG KURANG DIMINATI

Salah satu dampak dari *trend* tersebut adalah adanya fenomena sebagian orang tua yang terkesan ‘memaksa’ anaknya masuk ke sekolah-sekolah tertentu, misalnya ke pesantren.

⁵³Imam Suprayogo, *Pendidikan Berpradigma Al-Qur'an, Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam*, (UIN Malang, cet I 2004), h. 13.

Harapannya adalah sang anak menjadi ustad atau ulama. Tidak ada yang salah dengan harapan tersebut, bahkan itu sangat mulia. Kalau saja keinginan orang tua tersebut sejalan dengan keinginan anak maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan.

Akan tetapi jika sekolah tersebut tidak diminati anak, akan menimbulkan dampak negatif seperti koleksi bukunya terus menyusut, buku yang raib, beberapa benda berharga juga ikut-ikutan lenyap. Akhirnya, melakukan perbuatan yang seharusnya tidak terjadi.

Belum lagi jika anak yang dipaksa masuk pesantren itu masih berusia sangat dini. Kondisi yang demikian ini dapat dikaitkan dengan hadis Nabi SAW “*Siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan orang-orang yang dicintainya pada hari Kiamat.*”⁵⁴

Pada kenyataannya, banyak orang tua (khususnya ibu) yang sangat bersedih ketika berpisah dengan anaknya yang masuk pesantren. Demikian pula halnya dengan sang anak. Akibatnya orang tua tidak dapat beraktivitas dengan tenang, sementara sang anak tidak dapat belajar dengan baik. Di sisi lain, perlu diingat bahwa seseorang hanya akan mencapai potensi terbaiknya apabila ia melakukan hal yang sesuai dengan *passion* dan keinginannya.

Sistem pendidikan yang ideal adalah suatu sistem yang mampu menyerap semua anak didik dalam suatu kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan tersebut.⁵⁵ Namun ironi dan banyak yang menilai jika pendidikan nasional yang dicita-citakan masih jauh dari kenyataan, Menurut Ngainun Nain, potret pendidikan Indonesia masih sarat dengan wajah-wajah buram, bopeng, dan karena itu menimbulkan berbagai kekecewaan.

Potret buram mengenai buruknya infrastruktur pendidikan yang ada diberbagai daerah di Indonesia dalam aspek ini salah satunya dapat disaksikan dan disimak dalam film dan novel karya Andrea Hirata yang inspiratif “Laskar Pelangi” sebagai potret sekolahnya yang demikian buruk. “Tak usah melukiskan sekolah kami, karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan

⁵⁴ Maktabah Syamilah, *Sunan at-Tirmizi* bab IV hal. 134 nomor hadis 1566. Juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bab V h. 412 nomor hadis 23546. Abū `Isā al-Tirmidziy berkata, “Dalam bab ini terdapat riwayat dari `Aliy. Ini adalah hadits *hasan gharib*. Hadits tersebut diamalkan oleh ulama dari Sahabat Nabi SAW dan selainnya. Mereka membenci pemisahan antara tawanan, (yaitu) antara ibu dan anak, bapak dan anak, dan antara sesama saudara.” Hadis dimaksud dinyatakan *hasan* oleh Syekh al-Albaniy.

⁵⁵ Lihat Politisasi Pendidikan Indonesia, dalam website <http://id.shvoong.com/society-and-news/environment/2222548>, Diaksaes, 20 September 2014.

sekolah miskin di seantero negeri ini yang jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang seneweng ingin kawin, bisa rubuh berantakan”.⁵⁶

Kelima, Kenakalan Pelajar, selain persoalan pornografi, menurunnya akhlak dan moralitas siswa ditandai dengan semakin meningkatnya perilaku dengan sesama mereka. Keenam, nalar egoisme⁵⁷, pemaksaan terhadap pilihan orang tua yang bukan minat dan bakat siswa. Ketujuh, Masyarakat mabuk gelar.⁵⁸

F. MASYARAKAT YANG MABUK GELAR

Pendidikan Islam tradisional selalu menjadikan keberhasilan individu dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sebagai cita-cita dan tujuan pendidikan yang terpenting. Namun, filsafat pendidikan yang lebih memfokuskan individu ini secara perlahan-lahan berubah ke bentuk yang lebih memfokuskan pemenuhan kebutuhan dan minat masyarakat sejak umat Islam berada di bawah pengaruh pemikiran dan institusi institusi Barat.

Sekarang ini, Pendidikan menjadi alat mobilisasi sosial ekonomi individu atau Negara. Dominasi sikap seperti ini dalam dunia pendidikan telah melahirkan patologi psiko-sosial, terutama dikalangan peserta didik dan orang tua, yang terkenal dengan “Penyakit diploma” (diploma disease), yaitu usaha dalam meraih suatu gelar pendidikan bukan karena kepentingan pendidikan itu sendiri, melainkan karena nilai-nilai ekonomi dan social.⁵⁹

Secara historis dan sosio-kultural-psikologis masyarakat Eropa berkembang sejak abad 5 SM, kini mengalami pasang naik kemajuan dan memiliki pilar-pilar kemasyarakatan yang dikenal sebagai kapitalisme, industrialisme, sentralisme, militerisme, dan melakukan globalisasi industrialisme yang dilematis. Masyarakat tersebut mengintegrasikan sistem pendidikan sebagai bagian integral kebudayaan, memadukan sistem sekolah, ilmu dan teknologi serta mata pencaharian hidup. Sementara masyarakat Indonesia pasca terjajah, berpeluang melakukan akulturasi sistem persekolahan sistem Eropa dan Amerika, tetapi “terjebak pada ketergantungan intelektual” yang berdampak “pengejaran gelar akademik berorientasi legitimasi simbolik”.⁶⁰

⁵⁶ Andrea Hirata, *Laskar Pelangi*, (Yogyakarta; Bentang Budaya,2008), h. 17.

⁵⁷ Ngainun Naim, *Rekonstruksi.*, h. 80.

⁵⁸ Ngainun Naim, *Rekonstruksi.*,Ibid, h. 89.

⁵⁹Ibid, h. 166.

⁶⁰Dimiyati, *Pendidikan Keilmuan di Indonesia: Suatu Dilema Pengajaran dan Penelitian-Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains*, (Jakarta: September, 1996), h. 2.

Hal ini mungkin disebabkan pengembangan pendidikan ke pemikiran keilmuan belum mendapatkan perhatian serius dalam sistem persekolahan di Indonesia.

Gelar akademik dan ijazah diterima oleh seseorang sebagai tanda telah selesainya masa pendidikan tinggi formal dalam strata tertentu. Untuk memperoleh gelar dan ijazah menurut ketentuan dalam sistem pendidikan, seseorang harus terlebih mengikuti serangkaian kegiatan akademik dalam bentuk perkuliahan tatap muka, menyelesaikan tugas secara terstruktur baik secara individual maupun kelompok, melakukan kegiatan praktikum serta menyusun-mempertahankan dalam ujian dan dinyatakan lulus ujian skripsi (S1), tesis (S2), dan disertasi (S3).

Namun pada akhir-akhir ini komunitas masyarakat akademik, tokoh pendidikan, bahkan masyarakat pada umumnya dikagetkan oleh penyimpangan, bahkan pelecehan praktek jual-beli gelar akademik yang salah satu diantaranya dilakukan oleh UTS yang akhir-akhir ini banyak diulas media masa Surabaya.

Pengejaran gelar akademik yang berorientasi legitimasi simbolik dengan kedok lembaga pendidikan, menurut hemat penulis sudah cukup lama beroperasi. Padahal dalam Undang-Undang⁶¹ secara tegas dinyatakan bahwa mereka dapat dikenai sanksi 1 milyar dan atau penjara 10 tahun bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara yang memberikan ijazah dan gelar akademik tanpa hak dan jika dilakukan suatu perguruan tinggi dinyatakan ditutup. Sementara setiap orang yang membantu memberikan ijazah dan gelar akademik yang tidak memenuhi persyaratan dipidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 ratus juta rupiah (pasal 68:1). Sedangkan orang yang menggunakan gelar dan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 ratus juta rupiah (pasal 68:2).⁶²

Secara sosiologis, praktek jual beli gelar dan ijazah menunjukkan masih kuatnya dampak penajahan dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Hal ini setidaknya berkaitan dengan status sosial yang akan dimiliki orang-orang yang bergelar tersebut, dan ekspektasi sosial yang diharapkan mereka akan diberikan oleh masyarakat. Orang yang memiliki gelar akademik atau lulusan perguruan tinggi biasanya secara langsung maupun tidak langsung akan menduduki “status sosial” tertentu di masyarakat. Orang-orang yang silau dengan gelar mempunyai persepsi

⁶¹Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pasal 67

⁶². Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Bandung: Citra Umbara, 2005), h. 112.

bahwa gelar akademik yang dimiliki secara illegal itu akan menjadi tiket bagi peningkatan status sosial atau kenaikan pangkat dan jabatan di tempat kerja.

Menghadapi fenomena ini, kita sebagai ilmuwan pendidikan harus mengembalikan fungsi pendidikan, bahwa gelar akademik harus diraih oleh seseorang secara legal dan prosedural. Demikian juga “status” harus diusahakan atau diperoleh melalui upaya dan proses pendidikan formal secara prosedural. Maksud disini bahwa status dan gelar bukanlah sesuatu yang bersifat warisan atau karena faktor keturunan, bukan diperoleh melalui praktek jual beli dengan membayar sekian juta, dan seterusnya. Gelar yang diperoleh secara illegal ibarat topeng kepalsuan dan kebanggaan semu belaka, tanpa nalar, nilai, dan etika.⁶³

Gelar yang tidak diperoleh secara etik keilmuan sekaligus tidak memiliki makna. Yang ada di dalamnya hanyalah transaksi ekonomi antara penjual gelar dan pembelinya. Karena rasionalitas ekonomi yang dijadikan pertimbangan, maka lembaga pendidikan tinggi tak ubahnya sebagai pasar dengan menjadikan gelar dan ijazah sebagai komoditasnya.

Pemikiran keilmuan telah direduksi menjadi sebuah rasionalitas instrumental, yakni sesuatu sarana, instrumen, dan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan mengabaikan nilai-nilai dan makna serta tidak peduli dengan proses dan ketentuan-ketentuan akademik yang prosedural. Pengejaran gelar akademik berorientasi legitimasi simbolik, jelas melecehkan nilai-nilai kejujuran ilmu pengetahuan, pemikiran keilmuan, moral serta komitmen Ketuhanan dan Kemanusiaan.

Mereka pengguna gelar akademik simbolik, menurut hemat penulis telah membohongi diri sendiri, juga riskan menyalahgunakan untuk menipu orang lain. Diakui atau tidak orang-orang yang menyandar gelar akademik dan memiliki ijazah dengan cara-cara yang tidak terpuji dan tidak patut itu telah melakukan kebohongan publik dan penipuan terhadap masyarakat luas. Selama orang-orang seperti itu pamer dan bangga dengan gelar-gelar illegal dan ijazah palsu itu, maka selama itu pula mereka sedang berbohong dan menipu diri sendiri di tengah khlayah. Inilah yang disebut dengan tragedi gelar tanpa nalar dan ijazah tanpa kuliah.

G. MINIMNYA ANGGARAN PENDIDIKAN

Permasalahan berikutnya dari pendidikan di Indonesia adalah anggaran pendidikan. Permasalahan anggaran pendidikan di Indonesia memang sangat kompleks. Di dalam sejarahnya, semenjak republik ini dipimpin oleh Presiden Soekarno, kemudian berturut-turut digantikan Presiden Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, belum pernah

⁶³ Dimiyati, *Pendidikan Keilmuan di Indonesia: Suatu Dilema Pengajaran dan Penelitian - Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains*, (Jakarta: September, 1996), h. 4.

pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai⁶⁴ walaupun saat ini anggaran pendidikan 20 % dari APBN sudah mulai terlaksana namun belum bisa mengejar keteringgalan kita dari negara-negara maju.

Untuk mengukur keseriusan pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia pada sektor pendidikan yang berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari segi anggaran pendidikan yang ditargetkan 20% dari APBN sesuai amanah Undang-Undang, bandingkan dengan Malaysia misalnya, yang sejak merdeka (1957) menyediakan anggaran pendidikan yang tak pernah kurang dari 20 persen APBN-nya. Pemerintah hanya mampu melakukannya sesuai dengan prinsip bertahap. Hal tersebut disisi lain bidang pembangunan menuntut anggaran pada sektor ekonomi, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

Sebagai perbandingan anggaran pendidikan di Indonesia dengan negara lain menurut Muhammad Rifai mengutip Ki Suprioko dari hasil penelitiannya 174 negara anggota PBB adanya pengaruh positif anggaran pendidikan terhadap kinerja pendidikan, semakin tinggi anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah, semakin baik kinerja pendidikan di negara bersangkutan. Sebaliknya, semakin rendah anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah, semakin buruk kinerja pendidikan di negara yang bersangkutan. Jika diukur dari GNP (Gross National Product), anggaran pendidikan tergolong sangat rendah. Indonesia hanya mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pendidikan sebesar 1,4 persen dari GNP.⁶⁵

Dalam sistem pembiayaan pendidikan, Indonesia termasuk negara paling tidak kompromis dengan anggaran pendidikannya. Artinya, anggaran yang disediakan untuk pembiayaan pendidikan di Indonesia tidak pernah mencapai jumlah yang memadai. Jangankan dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Norwegia, Kanada, AS, dan New Zealand yang mengalokasikan anggaran pendidikan relatif sangat tinggi dari GNP-nya, sedangkan dibandingkan dengan negara-negara disekitarnya saja, anggaran pendidikan di Indonesia tidak pernah mencapai angka lebih tinggi.

Malaysia sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 5,2 persen dari GNP-nya, Singapura 3,0 persen, Thailand 4,1 persen, dan Australia, bahkan sudah 5,6 persen. Angka 1,4 persen anggaran pendidikan Indonesia tersebut di atas juga relatif terlalu rendah karena angka rata-rata pada negara-negara berkembang 3,8 persen, dan negara-negara maju mencapai 5,1 persen. Jadi, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia angkanya tidak saja lebih rendah dari

⁶⁴ Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2011) h. 101.

⁶⁵ Muhammad Rifai, *Politik*, Ibid,

rata-rata di negara-negara maju dan negara-negara berkembang, tapi ternyata juga lebih rendah dari rata-rata angka di negara-negara belum maju atau terbelakang seperti anggaran pendidikan di Banglades (2,9), Nepal (3,1), Ethiopia (4,0), Togo (4,7), Cote d'Ivoire (5,0), Malawi (5,5) dan negara-negara terbelakang lainnya yang ada di benua Afrika.⁶⁶

Kecil anggaran pendidikan tersebut di atas membawa dua resiko yang untuk memilihnya, cukup berat. Seperti seseorang yang sedang sakit disodori obat yang pahit. Kalau ingin sembuh, obat pahit mesti diminum. Tapi kalau tidak mau pahit, orang tersebut harus menerima untuk sakit terus, paling tidak ia akan terlambat sembuh.⁶⁷

Anggaran pendidikan nasional atau pembiayaan pendidikan nasional sebenarnya juga memberikan bantuan kepada kementerian lain, yaitu Kemenag. Misalkan di Kemenag, walaupun populasi siswanya hanya 10-15% dari keseluruhan siswa peserta pendidikan secara nasional. Mereka tetap mendapatkan anggaran cukup signifikan. Besarannya sekitar 40% dari anggaran pendidikan Kemendiknas.⁶⁸ Besarnya anggaran pendidikan di Indonesia yang pernah mengalami hal yang sangat memprihatinkan dapat dilihat sebagian kecil data pengalokasian anggaran sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang pernah dikaji Ace Suryadi yang dikutip oleh Prof. Dr. Agus Irianto dalam Kompas 24 Juni 2002, bahwa pada tahun 1995/1996 mencapai 13,8 % dari APBN. Mengalami penurunan pada tahun 2000 menjadi 5,6 % dan turun kembali pada tahun 2001 menjadi 3,8 % atau sebesar Rp.295,113 triliun.⁶⁹ Hal ini berarti anggaran pendidikan pada masa pemerintahan orde baru lebih tinggi bila berbanding dengan kabinet reformasi.
2. Pada tahun 2002 pemerintah menganggarkan 5,8 persen dari APBN. Anggaran pendidikan pada tahun 2002 mencapai 24,7 % (11,552 triliun) yang diambil dari dana sektor pembangunan (Rp. 47 triliun) atau 5,8 % dari total APBN, ternyata setelah dilakukan perhitungan secara cermat tidak ada perubahan atau (kemajuan) bila

⁶⁶ Muhammad Rifai, *Politik*, Ibid, h. 102-103.

⁶⁷ Artinya, Kalau ingin pendidikan dinikmatinya bermutu baik, mesti ikut berpartisipasi membantu membiayai pendidikan di tempat putra-putrinya bersekolah atau kuliah. Kalau tidak mau membantu, mesti menerima—dan jangan mengeluhkan—pendidikan yang kurang bermutu baik. Suyanto dan M.S Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h.191-192.

⁶⁸ Muhammad Rifai, *Politik*, Ibid, h. 90.

⁶⁹ Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 84.

- dibandingkan dengan anggaran sektor pendidikan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2000 Rp.11,3 triliun dan pada tahun 2001 11,5 triliun.
3. Pada tahun 2004 alokasi anggaran hanya 6,6% dan terealisasinya masih sekitar 5,5%, pada tahun 2005 berjumlah Rp. 33,8 triliun, atau 20% namun dalam realisasi pada APBN 2005 hanya mengalokasikan anggaran 24,6 triliun atau 6 % total anggaran.⁷⁰
 4. Untuk tahun 2006 anggaran pendidikan kita baru Rp 41,3 triliun atau sekitar 9,1% dari APBN, bahkan peningkatan anggaran pendidikan yang diajukan oleh pemerintah untuk RAPBN 2007 sangat tidak signifikan sekali yakni hanya menjadi Rp.51,3 triliun atau sekitar 10,3 % dari RAPBN.
 5. Pada tahun 2008 ditetapkan dengan menganggarkan 11,8% untuk sektor pendidikan atau sekitar 48,3 triliun dengan total 285,5 triliun APBN. Pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp.207,4 triliun untuk anggaran pendidikan dari total APBN 2009 sejumlah 1.037,1 triliun. Dana pendidikan yang mencapai 20% sebesar 207,4 triliun tersebar pada Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp.61,5 triliun, Departemen Agama sebesar Rp.23,3 triliun, Kementerian Negara/Lembaga lainnya sebesar Rp.3 triliun, bagian anggaran 69 sebesar Rp.1,7 triliun dan melalui transfer ke daerah sebesar 117,9 triliun, Namun anggaran pendidikan 20% yang ditetapkan pemerintah dalam RAPBN 2009, tidak menjamin bahwa seluruh warga negara usia pendidikan dasar bisa mengikuti pendidikan atas biaya pemerintah sebagaimana amanat konstitusi.⁷¹ Pada hal keharusan menetapkan alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD adalah amanah UUD 1945 pada beberapa poin yang menyatakan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan. Selain itu UU

⁷⁰ Mandala Harefa, Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Antara Keinginan dan Keterbatasan, dalam website, www.dpr.go.id, Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan (Masalah Konstitusi dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan 20 persen Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Indonesia, Bab 2, 2009_6.pdf-Adobe Raider.), Diakses, 10 September 2014.

⁷¹ Kenaikan anggaran tersebut hanya digunakan antara lain untuk melakukan rehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru. Kemudian memberikan hibah dalam bentuk bantuan operasional langsung ke sekolah yang dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian untuk menyediakan beasiswa untuk lebih dari satu juta siswa SD/MI, lebih dari 600 ribu siswa SMP/MTs, 900 ribu siswa SMA/SMK/MA, dan lebih dari 200 ribu mahasiswa PT/PTA yang sebagian besar siswa dan mahasiswa tersebut, berasal dari keluarga tidak mampu. Termasuk untuk membiayai perbaikan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, Kusfiardi, Politisasi Anggaran Pendidikan, dalam website, <http://kusfiardi.wordpress.com> /2009/11/18. Diakses, 10 September 2014.

Sisdiknas menegaskan pentingnya pendidikan yang bermutu. Sebenarnya kita patut mencurigai bahwa sejak awal, sebagaimana dirumuskan dalam RPJM 2005-2009, Presiden SBY menggunakan kebijakan fiskal hanya untuk mendongkrak popularitas semata. Presiden SBY melupakan sama sekali arti penting mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.⁷²

Menurut Data Pokok APBN-P 2008 dan APBN 2009, pada tahun 2005 alokasi anggaran Depdiknas ini mencapai Rp 23.117,4 miliar atau 19,23% dari total APBN. Selanjutnya terus mengalami kenaikan, pada tahun 2006 mencapai Rp 37.095,1 miliar atau 22,44% dari total APBN, Rp 40.476,8 miliar atau 18,95% dari total APBN pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 mencapai Rp 45.296,7 miliar atau 16,67% dari total APBN. Pada tahun 2009, alokasi anggaran Depdiknas dalam belanja pemerintah pusat mencapai Rp 62.098,3 miliar atau 19,76% dari total APBN.⁷³

H. ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Setiap strategi mengandung kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan ini pada intinya adalah menggerakkan semua komponen sekolah yang bermuara pada peningkatan kualitas lulusan. Strategi untuk meningkatkan mutu mencakup membangun kapasitas level birokrat, sekolah dan kelas.⁷⁴

1. Membangun Kapasitas Level Birokrat

Konsep ini menekankan pada kerja sama sebagai prinsip dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. *Capacity building* yang diperlukan mencakup tiga hal; a) pengembangan nilai-nilai atau budaya kerja yang menjadi jiwa pelaksanaan kegiatan, b) infrastruktur yang mejadi landasan untuk melaksanakan kerja, dan c) pengembangan tenaga pendidik, khususnya guru, sebagai inti pelaksana kegiatan yang harus dilaksanakan.

Membangun kapasitas level birokrat berarti mengembangkan suasana kerja di kalangan staf dan pegawai kantor pendidikan di segala jenjang, yang menenankan pada penciptaan kondisi kerja yang didasarkan pada saling percaya mempercayai untuk dapat melayani sekolah

⁷² Kusfiardi, Politisasi., Ibid,

⁷³ Ibnu Purna Hamidi Elis, *Anggaran Pendidikan Dalam APBN*, dalam website, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3723&Itemid=29, Diakses, 15 September 2014.

⁷⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) h. 3-4.

sebaik mungkin, agar sekolah dapat mengelola proses belajar mengajar (PBM) dan meningkatkan mutunya masing-masing sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Di bidang infrastruktur, pembangunan kapasitas pada level birokrat kantor, keberadaan operation room mutlak diperlukan. Pada operation room paling tidak memiliki peta sekolah dan kualitasnya, peta guru, jumlah, penyebaran, kesesuaian, dan kualifikasi pendidikannya dan data yang senantiasa dimutakhirkan dari tahun ke tahun. Di samping itu diperlukan juga suatu sistem, mekanisme dan prosedur pelatihan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah dan pengawas. Berdasarkan data dan fakta yang ada pada operation room bisa dikembangkan berbagai scenario peningkatan mutu sekolah, mutu kepala sekolah, mutu guru, di suatu daerah atau wilayah.

Di samping itu, dalam pembangunan kapasitas sekolah pada level birokrat kantor perlu dikaji dan ditentukan scenario bagaimana pemberdayaan guru, pengembangan dan peningkatan kemampuan guru secara berkesinambungan dilaksanakan. Dalam peningkatan mutu guru harus ditekankan pada pemberdayaan dan pendinamisian Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarak Kepala-Kepala sekolah (MKKS). Dinamisasi dapat meningkatkan interaksi akademik antara guru dan kepala sekolah, dan mengembangkan kemampuan di kalangan guru melalui refleksi secara sistematis atas apa yang dilakukan dalam proses belajar mengajar.

2. Membangun Kapasitas Level Sekolah

Membangun kapasitas berarti membangun kerjasama, membangun trust, dan membangun kelompok atau masyarakat sehingga memiliki persepsi yang sama kemana akan menuju dan dapat bekerjasama untuk mewujudkan tujuan itu. Membangun kapasitas diarahkan pada sekolah sebagai suatu sistem dan juga level kelas sebagai inti dari sekolah. Jadi membangun kapaistas mencakup membangun diri idividu, kelompok dan organisasi di satu sisi dan membangun kepemimpinan di sisi lain. Membangun kapasitas level sekolah mencakup; mengembangkan visi dan misi, mengembangkan kepemimpinan dan manajemen sekolah, mengembangkan kultur sekolah, mengembangkan a learning school, dan melibatkan orang tua, alumni dna masyarakat serta memahami tantangan yang dihadapi kepala sekolah.

3. Membangun Kapasitas Level Kelas

Inti dari mutu pendidikan terletak pada apa yang terjadi diruang kelas. Meningkatkan mutu sekolah pada intinya berujung pada peningkatan mutu belajar mengajar di ruang kelas. Oleh karenanya, membangun kapasitas sekolah harus membangun kapasitas kelas. Kapasitas

kelas merupakan proses yang memungkinkan interaksi akademik antara guru dan siswa, dan antara komponen di sekolah yang berlangsung secara positif. Interaksi anatar guru dan siswa merupakan inti dari kegiatan di sekolah.

Interaksi memiliki dua macam sifat, yakni: sifat positif dan negatif. Interaksi yang positif akan melahirkan energi yang positif yang akan mendukung peningkatan mutu. Sebaliknya interaksi negatif akan menghasilkan dampak negatif bagi upaya peningkatan mutu. Dengan demikian, kepala sekolah harus melakukan rekayasa agar di kelas muncul interaksi guru dan siswa yang bersifat positif.⁷⁵

Beberapa hal ihwal yang berkaitan erata dengan pembangunan kapaistas level kelas antara lain; memahami hakekat proses belajar mengajar, memahami karakteristik kerja guru, mengembangkan kepemimpinan pembelajaran, meningkatkan kemampuan mengelola kelas, dan tantangan guru.

Secara umum ada tujuh⁷⁶ solusi yang ditawarkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional yaitu

1. Tingkatkan komitmen pemerintah pada dunia pendidikan terutama dalam bidang anggaran.
2. Merubah paradigma filosofis.
3. Produk pendidikan bukan lulusan, tapi pelayanan.
4. Pengajaran.
5. Penelitian.
6. Manajemen pendidikan
7. Pembelajaran yang demokratis, dialogis yang menjadikann perpustakaan, laboratorium dan lapangan sebagai sumber belajar.

I. KESIMPULAN

Berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di negeri ini seperti kurikulum yang kurang mencerdaskan, buruknya infra struktur sekolah terutama di daerah-daerah pelosok, nalar egoisme dimana pendidikan dipaksakan pada anak padahal pelajaran itu atau tempat sekolah tersebut sangat tidak diminati dan masyarakat yang mabuk gelar serta minimnya anggaran pendidikan

⁷⁵ Depdiknas. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*; Buku 1. Koonsep Dasar. Jakarta: Depdiknas.

⁷⁶Baharuddin, *Aktualisasi*, h. 236-237.

adalah merupakan potret buram pendidikan Indonesia yang harus dihilangkan, sehingga potret buram tersebut dapat berubah menjadi potret yang mencerahkan bagi anak bangsa Indonesia di masa mendatang.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam mencari solusi keburaman pendidikan di Indonesia, baik dari faktor pemerintah, pelaku pendidikan, dan masyarakat. Kesemua faktor ini harus bergandengan tangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Maka yang terpenting adalah adanya keinginan untuk memperbaiki dan bukan saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika ingin pendidikan di Indonesia maju, semua yang terkait dengan pendidikan harus menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh, tanpa melihat kelemahan-kelemahan pihak-pihak lain.

Sistem pendidikan di Indonesia harus diperbaharui dari nalar idealisme yang tinggi menjadi nalar yang menguasai nilai-nilai ilmu dan teknologi, nilai-nilai luhur budaya Indonesia dan penanaman nilai-nilai agama. Harus ada komitmen dan mentalitas pelaku pendidikan yang kuat baik dari pihak pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburrahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra Proklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)
- Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Andrea Hirata, *Laskar Pelangi*, (Yogyakarta; Bentang Budaya, 2008).
- Artikel Pendidikan Indonesia, dalam website, <http://www.artikelbagus.com/2012/03/.html>, Diakses, 10 September 2014.
- Baharuddin, *Aktualisasi Psikologi Islami*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)
- Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama. (Jakarta: Balitbang Depdiknas, tahun 2000).
- Depdiknas. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*; Buku 1. Konsep Dasar. (Jakarta: Depdiknas, 2003).
- Depdiknas, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang, 2002)
- Dimiyati, *Pendidikan Keilmuan di Indonesia: Suatu Dilema Pengajaran dan Penelitian - Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains*, (Jakarta: September, 1996)

- E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006)
-, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
-, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006)
- <http://id.shvoong.com/society-and-news/environment/2222548>, Diakses, 20 September 2014.
- <http://meilanasim.wordpress.com/2009/03/08/makalah-masalah-pendidikan-di-indonesia/>
(diakses 21 September 2014)
- Ibnu Purna Hamidi Elis, *Anggaran Pendidikan Dalam APBN*, dalam website,
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3723&Itemid=29, Diakses, 15 September 2014.
- Imam Suprayogo, *Pendidikan Berpradigma Al-Qur'an, Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam*, (UIN Malang, cet I 2004).
- Invantra Padang, *Penomena Sekolah Elit Muslim*, Dalam Asnil Aidah Ritonga(ed), *Pendidikan Islam Dalam Buaian Arus Sejarah*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008)
- James H. Stronge, et.al., *Qualities of Effective Principals* (Alexandria, Virginia, USA: ASCO, 2008)
- Jean Piaget, *The Psychologi of the Child (Psikologi Anak)*, Terj.Miftahul Jannah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Kusfiardi, Politisasi Anggaran Pendidikan, dalam website, <http://.kusfiardi.wordpress.com/2009/11/18>. Diakses, 10 September 2014.
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Maktabah Syamilah, *Sunan at-Tirmizi* bab IV hal. 134 nomor hadis 1566.
- Mandala Harefa, Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Antara Keinginan dan Keterbatasan, dalam website, www.dpr.go.id, Kebijakan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Bab 2, 2009_6.pdf-Adobe Raider, Diakses, 10 September 2014.
- Mansur Muslich, *KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual Panduan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2011)
- Musnad Imam Ahmad bab V hal 412 nomor hadis 23546.
- Ngainun Naim, *Rekonstruksi Pendidikan Nasional Membangun Paradigma yang Mencerahkan*, (Yogyakarta: Teras, 2010).

Peraturan Menteri Keuangan RI no 201/PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun 2013, bab II Pasal 2

S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Bandung: Penerbit Jemmars, 1988)

Suyanto dan M.S Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001)

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara, 2005)

Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, terjemahan dari Bhs Inggris *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, (Jakarta:Mizan cetakan I, 2003)